

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata.

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan dari pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mengimplikasikan bahwa kepentingan dan keperluan yang diperlukan oleh pemerintah daerah harus mampu dalam mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri, sehingga diperlukannya sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai berbagai aktifitas dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Beberapa komponen sumber dari pendapatan asli daerah tersebut berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah (Sari Putu, 2013).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu tolak ukur yang penting dalam melihat seberapa tinggi kemampuan dan kemandirian suatu daerah dalam upaya melakukan

kebijakan pelaksanaan otonomi daerah secara professional, bijaksana dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki dampak positif bagi daerah yang mempunyai banyak potensi dari sumber daya alamnya. akan tetapi, tidak termasuk pada daerah yang masih tergolong dibawah rata-rata atau miskin dengan segala keterbatasan akan sumber daya alamnya. Saat ini yang menjadi salah satu permasalahan suatu pemerintah daerah yang pada umumnya adalah keterbatasan perolehan dana yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah sehingga proses pelaksanaan otonomi daerah belum dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan (Wandosa, 2015).

Pendapatan Asli Daerah sering diartikan dengan suatu cerminan dari tingkat kemandirian suatu daerah dalam upaya untuk membiayai pembangunan di daerah itu sendiri. Semakin tinggi PAD menandakan bahwa tidak bergantungnya suatu daerah dalam membiayai atau mengurus rumah tangganya atau daerahnya sendiri. Kemandirian suatu daerah juga diartikan dengan semakin kecil persentasi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan dan pembangunan daerah tersebut. Pendapatan asli daerah yang semakin besar juga memperlihatkan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan

retribusi daerah serta menandakan pula tumbuh kembangnya perekonomian daerah (Hibzon, 2007).

Menurut Badan Pusat Statistik, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna membiayai berbagai keperluan dalam kegiatan di daerah yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Rosa dan Sovita, 2016).

1) Pajak Daerah

Merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak daerah yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Jenis pajak kabupaten/kota menurut Undang-undang No 34 tahun 2000 yaitu:

- a) Pajak hotel yaitu pajak atas jasa pelayanan hotel. Hotel merupakan suatu bangunan yang disediakan untuk orang menginap atau sekedar beristirahat serta

memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran yang telah ditentukan.

- b) Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran merupakan fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman untuk dijual kepada orang dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kantin, warung, kafetaria, jasa boga atau catering dan lain-lain.
- c) Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan disini mencakup jenis tontonan, pertunjukan (pameran), permainan, dan berbagai keramaian yang dinikmati oleh penonton dengan dipungut biaya.
- d) Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame merupakan suatu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dibuat atau dirancang dengan tujuan untuk komersial untuk mempromosikan atau memperkenalkan agar dapat menarik khalayak umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, didengar dirasakan, dan dinikmati didepan umum.

e) Pajak penerangan jalan dan pajak penggunaan listrik yang telah disediakan dan pembayarannya ditanggung oleh pemerintah.

f) Pajak mineral bukan logam dan batuan

Pajak atas segala macam bentuk pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik diambil dari sumber lain yang ada didalamnya dan permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

g) Pajak Parkir

Pajak yang dikenakan untuk lahan parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha ataupun disediakan sebagai suatu usaha termasuk dalam penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

2) Retribusi Daerah

Merupakan salah satu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari pemberian izin tertentu yang secara spesifik telah disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan setiap individu atau pribadi maupun badan (Yani, 2008). Retribusi daerah ini juga dapat digolongkan

dalam tiga bagian sebagai berikut, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Ciri-ciri Retribusi Daerah yaitu:

- 1) Retribusi dipungut daerah dalam pungutan retribusi terdapat predikat baik yang diberikan langsung oleh daerah tersebut.
- 2) Retribusi dikenakan kepada semua orang yang memanfaatkan atau menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Contohnya: retribusi penyediaan jasa umum yaitu, pelayanan jasa kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, dan lain-lain. Sementara itu contoh retribusi jasa usaha antara lain, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir atau pertokoan, penjualan produksi usaha daerah, dan lain-lain dan yang terakhir contoh retribusi perizinan tertentu antara lain, izin mendirikan bangunan, izin trayek, dan lain-lain.
- 3) Hasil dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Merupakan penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil yang didapat dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan non bank,

bagian laba perusahaan milik daerah lainnya serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri dari hasil dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan lain-lain.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Saberan (2002), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu nilai tambah yang mampu menemukan berbagai kegiatan ekonomi didalam suatu wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya seringkali digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi disuatu daerah. PDRB juga diartikan sebagai barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk dalam suatu daerah tertentu disuatu wilayah tertentu dan dalam periode jangka waktu satu tahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini merupakan nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari berbagai seluruh kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode. Sementara itu nilai bersih tersebut sebenarnya merupakan timbal balik dari faktor jasa yang ikut berkontribusi dalam proses produksi yang terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan serta ditambah dengan penyusutan barang modal dan pajak tidak langsung netto, pajak tak langsung dikurangi subsidi (Sari, 2015).

Menurut Sadono (2012), terdapat cara dalam perhitungan nilai seluruh hasil produksi yang dihasilkan dalam suatu perekonomian dalam waktu satu tahun tertentu, perhitungan tersebut terdapat 3 cara sebagai berikut:

- 1) Cara Produksi

Nilai seluruh produksi diperoleh dari menjumlahkan nilai-nilai hasil produksi yang dihasilkan dari berbagai industri yang ada dalam perekonomian. Hasil perhitungan disebut produk domestik regional bruto, dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha yaitu; pertanian, pertambangan dan galian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan/konstruksi, perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, angkutan dan komunikasi, lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan, jasa-jasa.

2) Cara pengeluaran

Nilai seluruh produksi diperoleh dari penjumlahan berbagai pengeluaran yang dilakukan rumah tangga dan perusahaan, pemerintah dan luar negeri atas produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah, seperti: Pengeluaran konsumen rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari hutang, konsumen pemerintah, pembentukan modal tertentu domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto.

3) Cara pendapatan

Nilai seluruh produksi dalam perekonomian diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan dari seluruh faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi, yaitu: pendapatan dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal yang ditawarkan dan keahlian kepemimpinan. Ketiga pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa terdapat hubungan yang erat dan berkaitan antara tiga konsep tersebut diantara banyaknya barang dan jasa yang diproduksi, besarnya pendapatan yang diterima dan penggunaan pendapatan tersebut.

Dari ketiga pendekatan tersebut disajikan atas dasar harga berlaku dan konstan. Produk domestik regional bruto disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode

perhitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian, Sedangkan PDRB atas harga konstan (Rill) disusun berdasarkan atas harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. (Sadono, 2012).

Semakin tinggi pendapatan masyarakat atau seseorang maka semakin tinggi kemampuan seorang dalam membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian pada tingkat yang sama jika tingkat distribusi pendapatan tetap, semakin tinggi PDRB suatu daerah, semakin besar juga pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai pengeluaran secara rutin dan pembangunan yang telah disediakan pemerintah. Oleh karena itu, produk domestik regional bruto perkapita rill suatu daerah meningkat, maka akan semakin besar pula potensi dari sumber penerimaan daerah (Halim, 2001).

3. Pariwisata

a. Definisi Pariwisata

Pariwisata saat ini telah menjadi hal fenomena dalam kehidupan manusia dizaman yang modern. Segala aktivitas dan kegiatan manusia memiliki aspek dalam jangkauan yang luas, bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang dan berlibur saja

tetapi juga bisa mendapatkan pengetahuan serta menciptakan aktivitas lainnya seperti aktivitas ekonomi, sosial, seni dan budaya, sehingga hal tersebut mampu mencapai pada titik optimalisasi dalam berwisata (Arjana, 2016).

Pariwisata dizaman yang modern telah menjadi industri terbesar dan memeperlihatkan pertumbuhan yang konsisten dari setiap tahunnya. Proses globalisasi dunia disektor pariwisata mampu menyebabkan terjadinya interkoneksi antar bidang, antar bangsa, dan antar individu di dunia. Perkembangan disektor teknologi informasi juga mempercepat dinamika globalisasi dunia, termasuk perkembangan dunia hiburan, rekreasi, dan pariwisata (Utama, 2014).

Pariwisata merupakan salah satu jenis industri baru yang dinilai dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menciptakan penyediaan lapangan kerja kemudian peningkatan penghasilan, standar hidup seras berdampak positif pada sektor-sektor produktifitas lainnya. Sebagai sektor yang memiliki potensi yang besar, pariwisata juga meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata. Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang sebagai industri (Pendit, 2012).

Menurut Salah (2003), dalam bukunya yang berjudul "*Tourism Management*" pariwisata merupakan salah satu jenis

industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, standar hidup yang lebih baik selain itu juga dapat mendorong dalam sektor-sektor produktifitas yang lain.

Industri Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berkontribusi lebih banyak dalam penerimaan daerah sehingga, dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat dengan penambahan bagi devisa negara. Oleh sebab itu, jika jumlah kunjungan wisatawan yang datang semakin banyak maka akan berpengaruh terhadap meningkatkan penerimaan dan perolehan devisa negara yang semakin besar. Hal tersebut mampu mendorong pertumbuhan asli kebudayaan setempat, serta menyokong ruang gerak pembangunan dan perekonomian daerah (Spillane, 1987).

Menurut Badrudin (2001), salah satu yang menjadi sumber dari penerimaan pendapatan asli daerah pada industri pariwisata adalah industri pariwisata milik penduduk daerah sekitar (*Community Tourism Development* atau *CTD*). Pemerintah daerah dapat menerima peluang dari penerimaan pajak dan macam-macam retribusi secara resmi dari berbagai kegiatan industri pariwisata yang bersifat multisektoral, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak usaha wisata, pajak

perjalanan wisata, pendidikan formal dan informal serta pelatihan dan transportasi.

Definisi diatas dapat menunjukkan bahwa industri pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mampu membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, taraf hidup masyarakat dalam mengaktifkan sektor produksi lain di suatu daerah. Sehingga, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini, untuk memenuhi kebutuhan setiap wisatawan didaerah tujuan maupun perjalanan wisata akan semakin menimbulkan gejala konsumtif.

Kegiatan konsumtif yang dilakukan oleh para wisatawan ini akan memunculkan permintaan kebutuhan akan pangan sehingga, pada sektor pariwisata dalam hal ini dapat menimbulkan efek positif untuk masyarakat sekitar dalam melakukan perdagangan untuk kebutuhan konsumsi. Oleh karena itu, perlunya peran pemerintah dan swasta dalam meningkatkan pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan wisatawan yang semakin meningkat akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi pajak pada sektor pariwisata serta berdampak positif pada sektor lainnya.

b. Sifat Pariwisata

Menurut Direktorat Jenderal Pariwisata dalam (Hutasoit, 2017), terdapat beberapa sifat pariwisata yaitu sebagai berikut:

- 1) Pariwisata merupakan suatu bentuk kegiatan perjalanan atau kunjungan
- 2) Perjalanan yang dilakukan dalam pariwisata hanya memerlukan waktu yang relatif terbatas ketempat tujuan wisata
- 3) Perjalanan menuju dan tinggalnya wisatawan di tempat tujuan biasanya wisatawan bekerja dan tinggal, sehingga kegiatannya akan kelihatan berbeda dengan penduduk asli setempat. Perpindahan seperti hal tersebut bersifat sementara/singkat dengan niat untuk kembali ke tempat atau daerah asal dalam waktu tertentu.
- 4) Tujuan kunjungan bukan untuk bekerja atau mencari nafkah, melainkan untuk mendapatkan kesenangan, hiburan, dan pengetahuan.

c. Jenis Wisata

Menurut Pendit (2012), terdapat beberapa jenis wisata menurut motif tujuan perjalanan yaitu :

- 1) Wisata Budaya

Wisata budaya merupakan suatu unsur perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pengetahuan yang lebih

serta pandangan hidup dengan cara mengunjungi ketempat-tempat tertentu baik dalam negeri maupun diluar negeri. Kunjungan tersebut diharapkan mampu mempelajari segala sesuatunya seperti mempelajari adat istiadatnya, keadaan rakyat disuatu daerah atau negeri, kebiasaan dan cara hidup serta pandangan mereka terhadap budaya yang ada. Selain itu perjalanan seperti ini juga mengambil pelajaran seperti dengan mempelajari yang terdapat didalam budaya, eksposisi seni diantaranya pada kesenian tari, kesenian drama, musik dan seni suatu dan lainnya yang termasuk kedalam bagian sejarah.

2) Wisata Kesehatan

Wisata kesehatan merupakan perjalanan untuk seorang wisatawan dengan berkunjung ketempat yang memiliki fasilitas modern atau alamiah yang mampu dijadikan obat dengan tujuan untuk penyembuhan. Misalkan seperti seperti mata air panas yang mengandung mineral yang dapat menyembuhkan, tempat yang mempunyai iklim udara menyehatkan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas kesehatan lainnya.

3) Wisata Olahraga

Wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolah raga atau menghadiri pesta olahraga disuatu tempat

atau suatu negara seperti; *Asian Games, Olympiade, Thomas Cup, Uber Cup*, dan lain-lain. Olah raga lain yang tidak termasuk dalam pesta olahraga misalnya; berburu, memancing, berenang, dan berbagai cabang olahraga didalam air atau di pegunungan.

4) Wisata Komersial

Wisata komersial ini bertujuan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial seperti; pameran industri, pameran dagang, dan sebagainya. Pada awalnya banyak orang berpendapat bahwa hal ini tidak dapat digolongkan dalam dunia kepariwisataan dengan alasan bahwa kegiatan perjalanan untuk pameran atau pekan raya ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang khusus mempunyai urusan bisnis. Tetapi dalam kenyataannya pada dewasa ini dimana pameran atau pekan raya banyak dikunjungi oleh masyarakat kebanyakan dengan tujuan ingin melihat serta membutuhkan fasilitas akomodasi dan transportasi. Disamping itu dalam pekan raya atau pameran biasanya dimeriahkan dengan berbagai atraksi atau pertunjukan kesenian. Itulah sebabnya wisata komersial ini menjadi kenyataan yang sangat menarik dan menyebabkan kaum pengusaha angkutan dan akomodasi

membuat rancangan-rancangan istimewa untuk keperluan tersebut.

5) Wisata Politik

Jenis wisata ini meliputi perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian dalam peristiwa kegiatan politik misalnya perayaan 17 Agustus di Jakarta. Biasanya fasilitas akomodasi dan transportasi serta berbagai atraksi diadakan secara meriah bagi para pengunjung. Kegiatan wisata politik adalah peristiwa-peristiwa penting seperti; konferensi, musyawarah, kongres yang selalu disertai dengan kegiatan darmawisata.

6) Wisata Sosial

Wisata ini merupakan pengorganisasian suatu perjalanan yang murah dan mudah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat yang ekonomi menengah kebawah untuk mengadakan perjalanan, seperti misalnya kaum buruh, pemuda, pelajar, mahasiswa, petani dan sebagainya. Organisasi ini berusaha untuk membantu mereka yang mempunyai kemampuan terbatas dari segi finansial untuk dapat memanfaatkan waktu libur sehingga dapat menambah pengalaman dan memperbaiki kesehatan jasmaniah dan rohani mereka.

7) Wisata Pertanian

Wisata pertanian merupakan suatu formasi dalam perjalanan yang dilakukan pada tujuan proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya. Dimana wisatawan dapat melakukan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun untuk sekedar menikmati keberagaman macam tanaman.

8) Wisata Maritim (bahari)

Wisata maritim merupakan jenis wisata yang sering dikaitkan dengan berbagai kegiatan seperti kegiatan olahraga di air, teluk, pantai, danau dan juga kegiatan di dalam laut seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan atau mengambil gambar di dasar laut, berselancar, mendayung serta melihat berbagai keindahan laut yang ada.

9) Wisata Cagar Alam

Wisata ini biasanya diselenggarakan oleh agen atau penyalur perjalanan diutamakan pada usaha dengan jalan untuk mengatur wisatawan dalam berwisata ke suatu tempat cagar alam, taman lindung hutan di daerah pegunungan dan sebagainya yang habitat kelestariannya dilindungi oleh pihak berwajib dan undang-undang. Wisata ini berkaitan dengan berbagai keindahan alam dengan kesegaran cuaca di

udara pegunungan, fenomena kehidupan binatang dan kelangkaan marga satwa, serta berbagai tumbuhan yang jarang ditemukan ditempat lainnya.

d. Tujuan Pariwisata

Menurut Undang-Undang No. 10/2009 Tujuan Pariwisata sebagai berikut (Dewi dan Bandesa, 2016).

- 1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Mengurangi kemiskinan
- 4) Mengatasi pengangguran
- 5) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- 6) Memajukan kebudayaan
- 7) Mengangkat citra bangsa
- 8) Memupuk rasa cinta tanah air
- 9) Memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa
- 10) Mempererat persahabatan antar bangsa

e. Ekonomi Pariwisata

Menurut Prinsip ekonomi bahwa sumber daya mempunyai keterbatasan dan diperlukan suatu pengorbanan demi mendapatkannya. Pengorbanan bagi seorang wisatawan salah satunya adalah biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan diberbagai wisata. Biaya tersebut dapat digunakan

untuk berbagai aktivitas lainnya maupun untuk kebutuhan konsumsi.

Konsumsi wisatawan dalam memenuhi kebutuhannya dibedakan atas konsumsi terhadap barang-barang yang habis dipakai dan konsumsi wisatawan yang dapat dipergunakan berulang kali seperti akomodasi, hiburan dan lain-lain.

f. Dampak Pariwisata

Menurut Sutrisno Denny (2013), pengembangan sektor pariwisata memberikan berbagai dampak terhadap daerah tujuan wisata maupun masyarakat yang tinggal sekitar objek wisata. Dampak pariwisata bisa meliputi dampak sosial, budaya, dan ekonomi.

Dampak sosial misalnya masyarakat bisa berkomunikasi dengan wisatawan asing dan mempelajari banyak hal serta bertukar informasi dengan wisatawan asing. Selain itu masyarakat yang tinggal disekitar daerah objek wisata bisa mempelajari budaya dari berbagai belahan dunia dan memperkenalkan budaya daerah kepada wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Sedangkan dampak ekonomi terhadap masyarakat adalah terbukanya lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat akibat adanya usaha yang berkaitan dengan pariwisata seperti hotel, restoran, tempat hiburan dan sebagainya. Perkembangan yang semakin maju pada pariwisata

akan berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, yaitu salah satunya adalah sektor pariwisata yang berdampak positif terhadap pendapatan pemerintah (Utama, 2005).

Hasil langsung yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari kemajuan pariwisata tersebut yakni termasuk pada pajak daerah ataupun bukan pajak lainnya. Sektor pariwisata ini memberikan pengaruh langsung kepada pemerintah daerah melalui pajak daerah, laba badan usaha milik daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah yang berupa pemberian hak atas tanah pemerintah. Penerimaan dari pajak daerah itu sendiri, pada sektor pariwisata memberikan pengaruh langsung dari hasil pajak hotel, restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak minuman beralkohol serta pajak pemanfaatan air bawah tanah.

Belanja wisatawan untuk kebutuhan wisatanya pada daerah tujuan wisata akan mempengaruhi dalam penerimaan daerah baik secara langsung ataupun tidak. Dengan adanya proses jual beli yang dilakukan oleh penjual (Produsen) dan pembeli (konsumen) dengan menjual barang oleh-oleh atau souvenir serta penjualan jasa seperti restoran, hotel dan lain sebagainya. Sehingga, hal tersebut mampu mendatangkan perolehan penerimaan pendapatan daerah (Spillane, 1987).

g. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Pengunjung merupakan orang yang melakukan kunjungan dengan tujuan untuk menikmati destinasi wisata disuatu wilayah untuk memperoleh kebahagiaan. Sedangkan Wisatawan merupakan orang yang sedang melakukan perjalanan waktu durasi paling sedikit 24 jam untuk menikmati perjalanan dan kesenangan tanpa melakukan pekerjaan lain di daerah tujuan (Arjana, 2016).

Menurut Soekadijo (2001), jumlah wisatawan merupakan banyaknya orang yang melakukan perjalanan kesuatu tempat untuk didatangi sementara tanpa bertempat tinggal menetap. Adapun menurut Organisasi Wisata Dunia (WTO), Jumlah wisatawan merupakan penjumlahan keseluruhan orang yang bukan dari penduduk setempat yang melakukan suatu perjalanan dalam waktu yang relatif singkat.

4. Jumlah Kamar Hotel

Menurut Dinas Pariwisata, Hotel merupakan suatu bentuk usaha yang berupa bentuk seperti bangunan dengan berbagai fasilitas yang telah disediakan dengan bertukar transaksi pembayaran. Hotel bukan hanya digunakan sebagai tempat penginapan melainkan melainkan terdapat fungsi lain seperti untuk kegiatan bisnis dengan mengadakan perkumpulan rapat, untuk

kegiatan perkumpulan organisasi serta seminar nasional ataupun internasional (Novitri, 2014).

Sedangkan menurut Suastika dan Yasa (2017), Hotel merupakan salah satu jenis usaha yang menyiapkan pelayanan jasa bagi masyarakat dan wisatawan. Selain itu pajak hotel juga akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Perhotelan memiliki peran yang penting sebagai penggerak pembangunan daerah, diperlukan pengembangan dengan lebih kreatif dan inovatif sehingga mampu menjadi nilai jual dan daya tarik wisatawan untuk menginap, oleh karena itu diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah.

Hal ini dapat dikatakan bahwa, Hotel merupakan tempat yang disediakan bagi para wisatawan untuk menginap selama mereka berkunjung atau tempat untuk melakukan perjalanan wisata, kamar hotel dengan ketersediaan yang fasilitasnya memadai akan membuat para wisatawan merasa nyaman untuk menempati. Oleh sebab itu akan membuat wisatawan merasa ingin tinggal lebih lama di hotel tersebut dengan melanjutkan perjalanannya berwisata. Industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan penginapan akan memperoleh penerimaan pendapatan yang semakin tinggi apabila wisatawan itu menginap di hotel tersebut dengan waktu yang lebih lama. Seiring dengan

pertambahan jumlah hotel yang ada maka akan semakin banyak jumlah kamar yang tersedia.

Adapun jenis-jenis hotel berdasarkan lokasi menurut Ismayanti (2010) dalam bukunya tentang Pengantar Pariwisata sebagai berikut:

a. City Hotel

Hotel yang berada di perkotaan biasanya diperuntukan bagi masyarakat yang hanya tinggal sementara atau dalam jangka waktu yang singkat. City Hotel ini juga biasanya dipergunakan untuk melakukan kegiatan aktivitas bisnis dan organisasi karena terdapat fasilitas yang tersedia.

b. Residential Hotel

Hotel ini berlokasi di pinggiran kota besar dan jauh dari keramaian kota, tetapi biasanya di pergunakan untuk melakukan usaha-usaha. Hotel ini juga diperuntukan bagi orang yang ingin bertempat tinggal yang cukup lama atau dalam jangka waktu yang panjang.

c. Resort Hotel

Hotel yang bertempat di daerah pegunungan, tepi danau, tepi pantai dan tepi sungai. Hotel ini juga diperuntukan bagi orang yang ingin berkunjung untuk berwisata dan berekreasi pada saat waktu libur.

d. Motel (Motor Hotel)

Hotel ini bertempat di sepanjang jalan raya yang menghubungkan suatu tempat kota ke kota lainnya. Biasanya hotel ini di peruntukan bagi sopir atau pengendara untuk sekedar tempat istirahat yang sedang melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan Bus, kendaraan umum atau kendaraan pribadi.

Menurut Tarmoezi (2000), dalam bukunya yaitu *Hotel Front Office* jumlah hotel dapat dibedakan menjadi:

a. *Small Hotel*

Kamar yang tersedia tidak lebih dari 28 kamar.

b. *Medium Hotel*

Kamar yang disediakan berjumlah sekitar 28-299 kamar.

c. *Large Hotel*

Jumlah kamar yang disediakan lebih dari 300.

5. Jumlah Objek Wisata

Objek wisata menurut Marpaung (2002), merupakan suatu bentuk dari suatu kegiatan aktivitas dan fasilitas yang saling berhubungan, suatu daya tarik yang mampu menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung kesuatu daerah atau tempat tertentu. Objek wisata dan daya tarik sangat erat hubungannya dengan *travel motivation* dan *travel fasion*, karena wisatawan Ingin mendapatkan suatu pengalaman tertentu dalam kunnjungan kesuatu objek wisata.

Menurut Undang-undang No 10 tentang kepariwisataan yaitu daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki berbagai keunikan, keindahan dan nilai yang memiliki beragam kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan wisatawan serta daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata. Objek wisata adalah suatu bagian komponen yang terbilang penting dalam industri pariwisata, serta salah satu alasan bagi para wisatawan untuk berkunjung dengan melakukan perjalanan.

Menurut Yoeti (1996), dalam bukunya tentang Pengantar Ilmu Pariwisata, suatu daerah yang berkeinginan daerahnya dikunjungi oleh banyak wisatawan yaitu perlunya mengembangkan dalam 3 hal yang menarik diantaranya sebagai berikut:

a. Adanya sesuatu yang dapat dilihat (*something to see*)

Terdapat unsur baik itu barang atau lainnya yang dilihat sangat menarik. Jumlah objek wisata yang banyak dengan keunikan yang berbeda-beda hal demikian akan menimbulkan keunikan tersendiri dalam masing-masing objek wisata tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendapatkan perhatian terhadap atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai pertunjukkan saat orang berkunjung.

b. Adanya sesuatu yang dapat dibeli (*something to buy*)

Terdapat sesuatu baik barang atau lainnya yang menarik untuk dibeli seperti kebutuhan untuk cendramata atau *souvenir* sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung.

c. Adanya sesuatu yang dapat dilakukan (*something to do*)

Merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang bisa dilakukan oleh wisatawan dengan kenyamanan sehingga wisatawan akan merasa ingin lebih lama tinggal dan berwisata.

B. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan tolak ukur pendapatan masyarakat dengan pendapatan asli daerah, semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula seseorang mengeluarkan pendapatannya untuk membayar kewajiban pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap dengan semakin tingginya PDRB perkapita riil suatu daerah, maka akan semakin besar kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah (Rahma dan Handayani, 2013).

Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kinerja dalam melakukan pemungutan

pendapatan asli daerah adalah dengan cara melihat rasio antara total keseluruhan penerimaan PAD dengan PDRB. Produk Domestik Regional Bruto dijadikan sebagai tolak ukur perekonomian, jika PDRB meningkat maka akan berefek pada kemampuan masyarakat dalam membayar pajak (*ability to pay*) juga akan meningkat. Semakin tinggi tingkat produk domestik regional bruto perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Halim, 2001).

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Rahayu (2005), mengatakan hubungan antara PAD terhadap PDRB merupakan hubungan fungsional, dikarenakan PDRB merupakan fungsi dari PAD, oleh karena itu apabila PDRB meningkat maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga, memudahkan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan daerah. Selain itu juga mampu mendorong dalam peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan suatu produktifitasnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan dari faktor pendapatan asli daerah, jika PDRB meningkat maka diharapkan mampu menaikkan tingkat pendapatan pemerintah dari hasil pajak daerah. Oleh karena itu kenaikan pendapatan pemerintah akan meningkatkan fasilitas pemerintah dengan

meningkatkan produktifitasnya sehingga, menaikkan perkembangan ekonomi. Peningkatan perekonomian disetiap tahunnya akan meningkatkan kesanggupan masyarakat dalam membayar pajak dan lainnya (Hibzon, 2007).

2. Hubungan Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata

Menurut Cohen (1984), Perkembangan pariwisata akan berdampak pada suatu kondisi baik itu sosial dan ekonomi masyarakat, yang menjadi salah satunya pada pendapatan pemerintah.

Sementara menurut Leiper (1990), dalam bukunya *Tourism Management*. Wisatawan mampu memberikan dampak yang positif dari sisi ekonomi, mulai dari pendapatan penukaran valuta asing, pendapatan yang diperoleh dari bisnis atau usaha pariwisata, penyerapan tenaga kerja dengan membuka peluang masyarakat sekitar untuk memperoleh pekerjaan, menyehatkan neraca perdagangan luar negeri, serta pendapatan pemerintah melalui pajak yang harus dibayarkan. Hal ini menyatakan bahwa banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung dan lama menginap maka uang yang akan dibelanjakan tentu akan semakin meningkat akibat kebutuhan dalam berwisata. Tingkat kegiatan konsumtif akan memberikan efek pendapatan yang diterima pemilik industri pariwisata sehingga nantinya akan meningkatkan jumlah

penerimaan pajak dan retribusi yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah seperti hotel, restoran, industri, parker dan lain-lain.

Hubungan antara sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah adalah jika suatu daerah memiliki kelimpahan akan sumber daya alam yang banyak serta mampu dalam memanfaatkan sebagai tempat destinasi wisata yang mana hal tersebut akan memiliki dampak yang positif bagi daerah itu sendiri, selain masyarakatnya yang memperoleh pendapatan dari terbukanya lapangan usaha maupun mendapat keuntungan dengan dibukanya usaha kecil (UMKM). Tetapi juga bagi daerah yang akan memperoleh penerimaan pendapatan dari sektor pariwisata tersebut (Wijaya Ida dan Suidiana, 2016).

3. Hubungan Jumlah Kamar Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata

Hotel merupakan fasilitas yang disediakan untuk penginapan, selain itu fungsi lain dari hotel bukan hanya sekedar untuk menginap tetapi bisa dijadikan sebuah kegiatan bisnis, seminar ataupun hanya untuk beristirahat sejenak. Pembangunan hotel di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) didorong dengan semakin bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung untuk berwisata. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan secara maksimal dan optimal agar lebih dapat

menambah wisatawan yang berkunjung dan menginap di hotel, sehingga akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak hotel, dan retribusi daerah yang akan mempengaruhi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Novitri, 2014).

4. Hubungan Jumlah Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata

Objek wisata merupakan daerah tujuan wisata yang memiliki daya tarik terhadap masyarakat. Semakin banyak jumlah objek wisata maka seharusnya akan menarik para wisatawan untuk berkunjung ke daerah wisata khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya akan berdampak positif terhadap pendapatan pada sektor pariwisata yang akan menaikkan pendapatan asli daerah (Rahma dan Handayani, 2013).

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab ini akan membahas penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata yang mendasar pemikiran dan pertimbangan dalam menyusun penelitian ini.

Terdapat beberapa penemuan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan peneliti dalam menunjang dan membantu peneliti untuk menyempurnakan dan mendukung penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Armahidha (2011), pengaruh jumlah restoran, jumlah kamar hotel, jumlah wisatawan, dan jumlah

objek wisata terhadap pendapatan pariwisata di Kabupaten Temanggung Tahun 1985-2009, dengan judul Pengaruh Jumlah Restoran, Jumlah Kamar Hotel, Jumlah Wisatawan, dan Jumlah Objek Wisata Terhadap Pendapatan Pariwisata di Kabupaten Temanggung Tahun 1985-2009. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan pariwisata sedangkan variabel independennya adalah jumlah restoran, jumlah kamar hotel, jumlah wisatawan, dan jumlah objek wisata. Hasil penelitian tersebut bahwa jumlah kamar hotel tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan variabel lainnya seperti jumlah restoran, jumlah wisatawan, dan objek wisata memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan pariwisata di Kabupaten Temanggung tahun 1985-2009.

Selanjutnya pada tahun yang sama penelitian dilakukan oleh Sriyana dan Hertanto (2011), tentang sumber pendapatan asli daerah kabupaten dan kota. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independennya adalah jumlah industri, jumlah penduduk, dan pendapatan domestik regional bruto. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diperoleh hasil bahwa jumlah industri, jumlah penduduk, dan pendapatan domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hasil ini menggambarkan bahwa sektor pemerintah daerah sangat bergantung pada kegiatan ekonomi dan perkembangan industri di sektor swasta.

Namun pada tahun yang berbeda Shen dan Jin (2012), juga melakukan penelitian dengan judul *Fiscal Decentralization Revenue and Expenditure Assignments, and Growth in China*. Dalam penelitian ini variabel dependennya yaitu pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel independennya adalah tarif pajak pusat, tarif pajak provinsi, belanja, pendapatan, extra belanja, extra pendapatan, transfer pusat, remitansi provinsi, tenaga kerja, investasi, keterbukaan, dan inflasi provinsi tertinggal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel belanja, pendapatan, tarif pajak pusat, dan tarif pajak provinsi, berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel extra-belanja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian pada variabel extra-pendapatan dan variabel inflasi provinsi tertinggal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir variabel tenaga kerja (tk), investasi, keterbukaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ditahun selanjutnya yaitu tahun 2013 penelitian juga dilakukan oleh Rahma dan Handayani (2013), mengenai pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata, pendapatan perkapita terhadap penerimaan sektor pariwisata sektor pariwisata di Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa penerimaan sektor pariwisata, sedangkan jumlah kunjungan

wisatawan, jumlah objek wisata dan pendapatan perkapita merupakan variabel independennya. Hasil penelitian tersebut adalah jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata dan pendapatan perkapita memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata.

Penelitian selanjutnya dilakukan dengan adanya perkembangan dari variabel penelitian yang dilakukan oleh Novitri (2014), dengan judul determinasi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Penggunaan variabel dependen adalah pendapatan asli daerah sedangkan variabel independennya adalah jumlah kamar hotel, produk domestik regional bruto, restoran, rumah makan, rata-rata lama menginap dan jumlah wisatawan. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang diperoleh bahwa produk domestik regional bruto sektor pariwisata, jumlah restoran dan rumah makan, rata-rata lama orang menginap, dan jumlah wisatawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Sedangkan jumlah kamar hotel yang termasuk variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD sektor pariwisata, hal ini disebabkan karena jumlah kamar yang meningkat tidak bersamaan dengan banyaknya jumlah wisatawan yang menggunakan jasa penginapan tersebut.

Pada tahun yang sama juga penelitian dilakukan oleh Isnaini (2014), dengan meneliti mengenai potensi ekonomi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung. Variabel dependen yang digunakan dipenelitian ini adalah pendapatan asli daerah sedangkan, variabel independennya menggunakan variabel jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, dan pendapatan perkapita. Berdasarkan analisis perolehan yang didapat menunjukkan bahwa jumlah objek wisata, jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Tulungagung, sedangkan pendapatan perkapita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

Selanjutnya pada tahun yang berbeda, Muryawan dan Sukarsa (2016), juga melakukan penelitian dengan judul Pengaruh desentralisasi fiskal, fiscal stress, dan kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel independennya adalah Desentralisasi fiskal, fiscal stress, dan variabel kinerja keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal dan fiscal stress secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, variabel desentralisasi fiskal dan fiscal stress secara tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

melalui kinerja keuangan daerah, dan variabel kinerja keuangan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun yang sama penelitian dilakukan juga oleh Hounnaklang (2016), dengan Judul "*Concepts, Issues, and The Effectiveness of Alternative Tourism Management in Thailand: A Case Study of Plai Songkram Province*", bertujuan untuk melakukan studi investigasi mengenai konsep pariwisata alternatif, isu, dan manajemen di Thailand. Penelitian ini mengkaji proses partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata rumahan, hambatan dan faktor yang berkontribusi terhadap rusaknya manajemen, persepsi, dan kesadaran tuan rumah terhadap dampak pariwisata di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Metodologi penelitian ini yang digunakan mencakup tinjauan umum tentang kebijakan pariwisata saat ini dan perencanaan Provinsi Sumut Songkram, survei pengunjung, serta observasi partisipasif. Hasil penelitian ini memperoleh hasil bahwa Wisata homestay dapat menghasilkan karya dan pendapatan bagi penduduk lokal, namun ternyata biaya hidup dan harga tanah juga mengalami peningkatan secara dramatis.

Ditahun yang sama penelitian juga dilakukan oleh Prana (2016), dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. Variabel dependen dalam penelitian adalah PAD, sedangkan variabel konsumsi, produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, pajak daerah,

retribusi daerah merupakan variabel independennya. Hasil penelitian memperoleh bahwa variabel konsumsi, PDRB, jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan juga signifikan sedangkan retribusi daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan, variabel pajak daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan.

Namun pada periode yang berbeda Alghifari (2017), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2016, variabel yang digunakan memiliki kesamaan pada penelitian sebelumnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah PAD sedangkan variabel independennya adalah jumlah wisatawan, jumlah hotel, akomodasi, jumlah hunian kamar dan rata-rata lama menginap. Perolehan yang didapat dari penelitian menunjukkan bahwa jumlah wisatawan, jumlah hotel dan akomodasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, sedangkan jumlah hunian kamar dan rata-rata lama menginap tamu memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan.

Penelitian pada tahun yang sama juga dilakukan oleh Suastika dan Yasa (2017), dengan judul pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan dan tingkat hunian hotel terhadap pendapatan asli daerah (pad) dan kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Perolehan yang didapat menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap PAD, sedangkan lama tinggal

wisatawan tidak memiliki pengaruh terhadap PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, tingkat hunian hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan PAD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pada penelitian ini PAD sebagai mediasi hubungan jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya Syari (2017), melakukan penelitian pada tahun yang sama dengan judul *Sriwijaya International Journal Of Dynamic Economics And Business*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah produk domestik regional bruto sedangkan variabel independennya adalah fiskal desentralisasi, dan belanja kabupaten. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan, fiskal desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Selatan Sumatera. Namun, dalam uji parsial, belanja kabupaten ke provinsi rasio pengeluaran positif dan tidak signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2017), dengan judul aktivitas sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kota Paraman. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah PAD sedangkan variabel independennya adalah sarana pariwisata, objek wisata dan jumlah kunjungan wisatawan. Dari variabel independen tersebut bahwa sarana pariwisata, objek wisata dan jumlah kunjungan

wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di daerah kota pariaman.

Pada periode yang berbeda penelitian dilakukan oleh Susilowati dan Rahmadewi (2018), dengan judul *Encouraging a Regional Autonomy in Indonesia: An Analysis of Factors Affecting the Own Source Revenue of Central Java Province*. Pada penelitian ini variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah sedangkan variabel independennya adalah belanja modal, inflasi, dana alokasi khusus, pengeluaran pembiayaan (*financing expenditure*). Hasil penelitian memperoleh hasil variabel belanja modal dan *Financing Expenditure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan Variabel Inflasi dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD.

Penelitian pada periode terbaru dilakukan oleh Wijaya dan Yuliarmi (2019), mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Badung. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah PAD, sedangkan variabel independennya adalah kunjungan wisatawan, tingkat hunian kamar hotel, dan jumlah penduduk. Dari perolehan penelitian didapatkan bahwa secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan, tingkat hunian kamar hotel, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Badung. Sedangkan secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Badung. Tingkat hunian kamar hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Badung. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung.

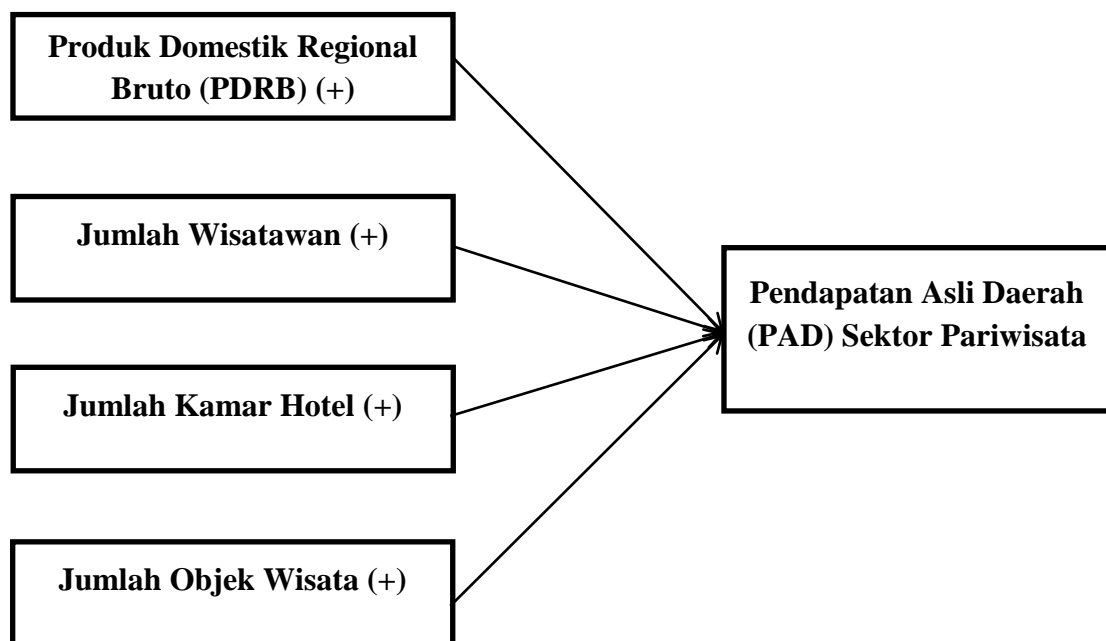
D. Penurunan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diduga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Jumlah Kunjungan Wisatawan diduga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Jumlah Kamar Hotel diduga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Jumlah Objek Wisata diduga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Model Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Kamar Hotel, dan Jumlah Objek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sehingga diharapkan dapat membantu dalam mengambil solusi maupun kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di DIY pada tahun selanjutnya. Berikut adalah gambar kerangka pemikiran dari penelitian.



2.1 Kerangka Berpikir